

Membangun Perdamaian Melalui Kampanye Digital Warga Jaga Warga Berbasis *Digital peacebuilding* dan Nilai Non-Kekerasan Mahatma Gandhi

Islamia Dewi Setyorini¹, Herlina Juni Risma Saragih², Ichsan Malik³, Rachmat Setiawibawa⁴, Arifuddin Uksan⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pertahanan Republik Indonesia
E-mail: islamia.setyorini@kn.idu.ac.id¹

Article History:

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 18 November 2025

Accepted: 29 November 2025

Keywords: Warga Jaga Warga, Digital Peacebuilding, Non-Kekerasan, Satyagraha.

Abstract. Kampanye Warga Jaga Warga merupakan inisiatif digital di Indonesia yang bertujuan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial melalui media sosial dan aktivitas luring. Berbeda dengan gerakan formal, kampanye ini berfungsi sebagai gerakan kesadaran kolektif yang mendorong warga untuk tetap waspada dan bersatu menghadapi potensi gangguan atau provokasi, terutama pada masa ketegangan sosial. Kampanye ini berhasil memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan perdamaian, solidaritas, dan perlindungan antarwarga, dengan dukungan dari berbagai pihak seperti komunitas lokal, aparat keamanan, LSM, dan influencer. Implementasinya tampak melalui aksi nyata seperti patroli lingkungan, diskusi komunitas untuk mencegah hoaks dan provokasi, serta kegiatan gotong royong membersihkan ruang publik. Tagar viral #WargaJagaWarga menjadi simbol pemersatu yang mengingatkan masyarakat untuk saling melindungi, menjaga kelompok rentan, dan menegaskan harmoni sosial. Pendekatan inklusif ini menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama serta menghidupkan kembali nilai budaya gotong royong dan keamanan bersama, termasuk melalui bentuk tradisional seperti siskamling. Secara keseluruhan, kampanye Warga Jaga Warga menunjukkan bagaimana sinergi antara teknologi digital dan partisipasi akar rumput dapat memperkuat kohesi sosial serta membangun budaya anti-kekerasan di era digital, menjadikannya model penting bagi pembangunan perdamaian dalam lanskap sosial-politik Indonesia yang kompleks.

PENDAHULUAN

Lebih dari 285 juta jiwa di Indonesia kini berada dalam fase digitalisasi massif yang memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sosial dan politik warganya. Berdasarkan laporan

We Are Social tahun 2025, tercatat sebanyak 143 juta pengguna media sosial di Indonesia, dengan tingkat penetrasi mencapai 97,8% (*We Are Social*, 2025). Persentase tersebut didominasi oleh generasi muda sebagai pengguna aktif di berbagai *platform* seperti Instagram, TikTok, X, dan YouTube. Bagi mereka, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, melainkan juga sebagai arena pembentukan opini publik, diskusi, serta partisipasi politik digital. Perubahan pola partisipasi politik generasi muda terlihat dalam penyebaran informasi politik, pengunggahan kritik kebijakan, hingga keterlibatan dalam petisi digital dan kampanye digital sosial-politik daring.

Transformasi digital ini menunjukkan adanya peluang partisipasi yang luas, namun sekaligus menghadirkan potensi ancaman bagi keamanan nasional. Media sosial dapat mempercepat sirkulasi opini yang mengarah pada disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial, yang berimplikasi pada ketidakstabilan sosial-politik. Salah satunya terlihat pada eskalasi gelombang unjuk rasa besar-besaran tanggal 25 Agustus hingga awal September 2025, yang berakibat pada kerusakan, pembakaran fasilitas publik, dan penjarahan di beberapa rumah pejabat negara.

Eskalasi ini dipicu oleh informasi provokatif dan hoaks yang terus menyebar secara massif (Purnomo, 2025), seperti video TikTok yang menggiring dengan keterangan terjadi demonstrasi atau keributan di Bandara Soekarno-Hatta (Tim Cek Fakta, 2025), padahal kondisi bandara stabil dan terkendali (KOMDIGI, 2025). Begitupun dengan klaim penjarahan di Gedung DPR dan Mall Atrium Senen, bahkan hoaks berbasis AI atau *deepfake*, semakin mendorong kemarahan publik dan aksi kekerasan. Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa aksi demonstrasi tidak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga di ruang digital sebagai bentuk *digital activism* (Purnomo, 2025).

Peningkatan gelombang demonstrasi yang anarkis menunjukkan bahwa disinformasi digital berpotensi menimbulkan ancaman nyata bagi keamanan nasional, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik. Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian nasional yang tengah berupaya bangkit (Purwanto, 2025). Isu yang awalnya berkaitan dengan kenaikan tunjangan anggota DPR semakin memburuk ketika menimbulkan korban jiwa, yakni Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang tewas akibat dilindas kendaraan taktis Brimob, sehingga demonstrasi berubah menjadi *chaos*.

Eskalasi unjuk rasa mulai meledak Kamis malam (28/08), dengan aksi pembakaran gedung parlemen dan fasilitas publik, penjarahan rumah pejabat, serta penyebaran *live* aksi di media sosial yang memicu replikasi serupa di berbagai lokasi (Azahra, 2025). Berdasarkan laporan Kemendagri yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Bima Arya pada 23 September 2025, tercatat 778 aksi unjuk rasa dan solidaritas terkait isu DPR RI tersebar di 35 provinsi sejak 25 Agustus hingga 8 September 2025, dengan konsentrasi di lokasi strategis seperti Mabes Polri, Mako Brimob, kantor Polda, Polres, serta gedung DPR RI dan DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerusakan infrastruktur akibat demonstrasi diperkirakan hampir mencapai 900 miliar rupiah (Metro TV, 2025), dengan 10 orang meninggal dan lebih dari 1.042 orang mengalami luka serta dirawat di berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia (Amri et al., 2025). Situasi ini juga mendapat perhatian internasional, Ravina Shamdasani dari Badan PBB Urusan HAM menuntut penyelidikan yang cepat, mendalam, dan transparan, serta menekankan pentingnya kebebasan pers. *Amnesty Internasional*, OHCHR, dan APhR juga mendorong penyelidikan tuntas serta dialog kemanusiaan untuk menjaga ruang berekspresi terbuka bagi masyarakat (BBC News, 2025).

Konteks krisis ini menegaskan pentingnya kampanye digital berbasis warga sebagai

mekanisme non-kekerasan untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik lebih lanjut. Kampanye digital Warga Jaga Warga lahir sebagai respons terhadap provokasi, disinformasi daring, kerusuhan massa, dan lemahnya kontrol sosial di wilayah perkotaan dan ruang digital. Melalui media sosial, aplikasi komunitas, dan jaringan pesan instan, masyarakat saling berkoordinasi, membagikan informasi, membangun sistem kewaspadaan bersama, serta menyerukan tindakan damai di ruang publik.

Kampanye digital ini berkembang menjadi simbol solidaritas digital yang bertujuan mencegah provokasi, menjaga ketertiban, serta melindungi fasilitas publik dan warga dari anarkisme. Fenomena ini menyebar ke berbagai kota, seperti Bandung (“Warga Jaga Kota”), Yogyakarta (“Ayo Jaga Jogja Bebarengan”), dan Jakarta lewat kampanye “Jaga Jakarta”, yang diikuti oleh banyak *NGOs* Indonesia, *influencer*, pemerintah pusat hingga daerah, serta seluruh lapisan masyarakat.

Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memahami dan merespons konflik, membuka peluang bagi praktik *digital peacebuilding* yang mendorong pencegahan kekerasan serta membangun kepercayaan sosial melalui partisipasi dan dialog inklusif. Teknologi memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam manajemen konflik lokal dan memperkuat kapasitas perdamaian di tingkat akar rumput (Young & Young, 2016). Dalam konteks ini, John Paul Lederach menekankan pentingnya *moral imagination* kemampuan membayangkan kondisi damai yang berakar pada realitas namun melahirkan kemungkinan baru untuk rekonsiliasi sosial (Hirblinger, 2023).

Nilai-nilai non-kekerasan Mahatma Gandhi relevan diterapkan dalam konteks kampanye digital sosial digital seperti *Warga Jaga Warga*. Kampanye digital ini merefleksikan prinsip Gandhi melalui solidaritas, empati, dan tanggung jawab moral kolektif tanpa kekerasan, sekaligus membingkai etika perilaku warga di ruang digital. Prinsip Sarvodaya yakni kesejahteraan bagi semua sejalan dengan semangat kampanye digital tersebut yang menekankan solidaritas lintas kelompok. Tiga dasar utama ajaran Gandhi, yaitu Satya (kebenaran), Ahimsa (tanpa kekerasan), dan Tapasya (pengendalian diri dan pengorbanan), menjadi landasan moral perjuangan damai dan empatik. Dalam ruang digital, nilai-nilai ini tercermin melalui upaya warga menolak provokasi, menyebarkan informasi yang benar, serta membangun kepercayaan sosial berbasis tanggung jawab moral kolektif. Seperti dikemukakan Gandhi, “*the pursuit of Truth did not admit of violence... but [the opponent] must be weaned from error by patience and sympathy*” (R.K.Prabhu, 1966).

Meskipun telah banyak penelitian mengenai teknologi dan perdamaian, kajian yang mengaitkan *digital peacebuilding* dengan prinsip non-kekerasan Gandhi dalam konteks Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah fenomena *Warga Jaga Warga* dan *Jaga Jakarta* sebagai bentuk nyata implementasi *digital peacebuilding* berbasis nilai Gandhi. Penelitian ini diharapkan memberikan pembaruan konseptual terhadap studi perdamaian kontemporer dengan menyoroti integrasi antara etika moral, budaya lokal, dan teknologi digital sebagai instrumen mewujudkan perdamaian positif di era modern.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *digital peacebuilding* dalam kampanye digital *Warga Jaga Warga*, mengidentifikasi penerapan nilai-nilai non-kekerasan Gandhi dalam ruang digital, serta menjelaskan kontribusinya terhadap pembangunan perdamaian positif di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Digital peacebuilding

Transformasi digital telah mengubah praktik pembangunan perdamaian dengan memanfaatkan media sosial, teknologi informasi, dan jaringan daring untuk memperkuat kohesi sosial, mencegah konflik, dan mendorong rekonsiliasi. Pendekatan ini melibatkan berbagai upaya mulai dari pemeliharaan perdamaian, peningkatan keamanan publik, hingga dukungan pada proses politik dan transformasi konflik melalui kebenaran, rekonsiliasi, dan keadilan. Kerangka ini memberikan pemahaman sistematis mengenai peran teknologi dalam mencegah, menyelesaikan, dan mengubah konflik (Hirblinger et al., 2023). *Digital peacebuilding* mendorong partisipasi masyarakat melalui komunikasi damai, kolaborasi, dan pemberdayaan, sekaligus menciptakan ruang aman untuk dialog lintas identitas sosial.

Media sosial memainkan peran sentral dalam pendekatan pencegahan konflik yang berorientasi pada manusia. Platform ini memungkinkan masyarakat global untuk secara langsung melaporkan berbagai bentuk kekerasan, kerusuhan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik, sehingga memberdayakan individu sebagai agen perubahan di komunitas mereka (Baytiyeh, 2019). Selain itu, media sosial menyediakan ruang bagi komunitas terdampak untuk bertukar informasi dan memberikan dukungan emosional selama masa krisis, memperkuat jaringan solidaritas sosial yang penting dalam proses pemulihan.

Ketersediaan data dalam jumlah besar melalui media sosial, didukung oleh tingginya partisipasi pengguna dan popularitas aplikasi seperti X dan Facebook, membuka peluang untuk mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih efektif. Dengan kemampuan memahami dan menganalisis komunikasi masyarakat secara *real-time*, upaya mitigasi ancaman seperti terorisme dan penanganan keluhan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan preventif sebelum konflik menjadi eskalatif (LeFebvre, 2016).

Pemberdayaan masyarakat dalam manajemen konflik lokal menjadi salah satu inovasi utama yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi digital. Alat komunikasi dan kolaborasi digital mendukung proses transformasi sikap dan memperkuat suara komunitas dalam upaya pembangunan perdamaian. Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga sarana transformatif yang dapat memperkuat pembangunan manusia yang berkelanjutan sekaligus mencegah kekerasan (Kahl & Larrauri, 2013). Fenomena digitalisasi telah membawa dampak signifikan dalam praktik peacebuilding selama beberapa dekade terakhir. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik, termasuk organisasi perdamaian, semakin mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi digital untuk mendukung agenda mereka.

Teknologi digital menjadi sumber kekuatan bagi para mediator, fasilitator dialog, staf penjaga perdamaian, dan pemantau gencatan senjata dalam membayangkan dan mewujudkan kemungkinan perdamaian (Hirblinger, 2023). Namun, pemahaman terhadap digitalisasi seringkali bersifat ahistoris, yang memperlihatkan teknologi sebagai kekuatan disruptif yang secara tiba-tiba mengubah dinamika konflik dan strategi peacebuilding. Pendekatan pasca-digital menawarkan kerangka kritis yang menelaah dan merekonstruksi makna teknologi digital tanpa jatuh pada glorifikasi teknologi semata. Pendekatan ini menilai dampak teknologi digital terhadap proses perdamaian serta konsekuensinya bagi masyarakat terdampak konflik, baik saat ini maupun di masa depan (Hirblinger, 2024a).

Oleh karena itu, penting bagi studi pembangunan perdamaian untuk memandang teknologi digital sebagai fenomena sosial yang kompleks dan terintegrasi dalam ekosistem sosial yang dinamis. Representasi digital, narasi, dan interaksi daring dapat memengaruhi persepsi, relasi kekuasaan, dan strategi perdamaian secara berlapis dan saling terkait. Pendekatan peacebuilding yang berkelanjutan di era digital harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial agar teknologi dapat benar-benar mendukung realisasi perdamaian yang

inklusif dan tahan lama (Hirblinger, 2024b).

Secara konseptual, pendekatan digital peacebuilding sangat relevan untuk menganalisis program "Warga Jaga Warga" karena program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di tingkat lokal. Melalui pemanfaatan teknologi digital, program tersebut mampu memperluas partisipasi warga, memperkuat kolaborasi antar komunitas, serta menciptakan ruang dialog yang aman dan inklusif yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Non-Kekerasan Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi, tokoh utama perjuangan kemerdekaan India sekaligus simbol perdamaian dan non-kekerasan global, mulai mengembangkan konsep Satyagraha saat tinggal di Afrika Selatan. Di sana, ia menyaksikan diskriminasi dan ketidakadilan rasial yang dialami komunitas India dan kulit berwarna. Pada 1907, Gandhi memimpin kampanye pembangkangan sipil besar-besaran menentang Asiatic Registration Act yang diberlakukan pemerintah Transvaal. Meski non-violence bukan ciptaannya, Gandhi dianggap sebagai "bapak non-kekerasan" karena menurut Mark Shepard, ia meningkatkan aksi non-kekerasan ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya. Krishna Kripalani juga menyatakan Gandhi adalah yang pertama memperluas prinsip non-kekerasan dari ranah individu ke sosial-politik (Gandhi, n.d.).

Satyagraha adalah perlawanan aktif tanpa kekerasan yang bertujuan mengalahkan lawan tanpa melukai dan tanpa menimbulkan kebencian, dengan metode pembangkangan sipil, mogok, dan tahan diri dari balas dendam. Sifatnya menggenggam kebenaran ("satya") dengan teguh ("agraha") dan memenangkan hati lawan lewat keteguhan moral dan kesabaran.

Tiga prinsip utama Satyagraha meliputi:

1. Satya (Kebenaran): Kebenaran bukan sesuatu yang mutlak mudah dikenal, namun manusia harus terus berusaha mencapainya melalui keterbukaan, kejujuran, dan keadilan. Gandhi menganggap kebenaran sebagai Tuhan sekaligus dasar nilai moral dan realitas tertinggi.
2. Ahimsa (Non-Kekerasan): Ahimsa (Non-Kekerasan) dalam konteks Gandhi bukan hanya berarti menghindari kekerasan fisik, tetapi juga menolak segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan pasif dan kekerasan dalam pikiran. Konsep ini diwujudkan melalui cinta tanpa syarat kepada semua makhluk, yang menjadi kekuatan aktif untuk melawan ketidakadilan tanpa menyakiti orang lain. Gandhi memperluas konsep ahimsa ke ranah sosial-politik sebagai metode perjuangan damai yang mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Ahimsa adalah kondisi cinta yang positif, mendorong melakukan kebaikan bahkan kepada pelaku kejahatan, tetapi tidak berarti membiarkan pelaku tersebut melanjutkan kesalahan atau menoleransi kesalahan itu melalui perlawanan pasif (King, 2022).

Langkah-langkah praktis dalam menerapkan Ahimsa meliputi: pertama, menganalisis akar penyebab konflik; kedua, mengklarifikasi kepentingan masing-masing pihak yang berseteru; ketiga, mendefinisikan tujuan yang diperjuangkan; keempat, merumuskan tujuan secara jelas agar dapat dipahami dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh; serta kelima, melakukan berbagai upaya untuk menghadapi perlawanan dari pihak lawan ketika tujuan yang dirumuskan tidak disetujui (Gregorius et al., 2023).

3. Tapasya (Pengorbanan Diri): Memerlukan keberanian menanggung penderitaan demi memegang teguh kebenaran tanpa membalas kekerasan. Ini adalah pengorbanan mulia yang membedakan keberanian sejati dari pengecut dan memberi contoh moral berharga bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip ini harus berjalan beriringan untuk memastikan keberhasilan satyagraha.

Ahimsa mendorong pelayanan sosial berdasarkan cinta, satya mengarah pada humanisme etis, dan tapasya menyiapkan kesiapan berkorban demi kebaikan. Prinsip ini menuntut pelaku memiliki keberanian dan keteguhan hati yang kuat, menjadikannya sebagai kekuatan moral yang mampu menembus permusuhan dan mencapai perdamaian sejati (Massey, 2017).

Keterkaitan antara *digital peacebuilding* dan prinsip non-kekerasan Gandhi terletak pada upaya transformasi sosial yang damai dan inklusif. Digital peacebuilding sebagai medium teknologi mendistribusikan nilai-nilai non-kekerasan, sementara prinsip Gandhi menjadi fondasi moral bagi perilaku kolektif di dunia digital. Kampanye digital seperti Warga Jaga Warga merepresentasikan integrasi keduanya melalui teknologi yang memperkuat solidaritas, saling menjaga, dan membangun budaya damai berlandaskan kasih dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus terhadap kampanye digital *Warga Jaga Warga*. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kampanye digital ini merepresentasikan praktik *digital peacebuilding* yang berlandaskan prinsip non-kekerasan Mahatma Gandhi. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari jurnal ilmiah, buku, dan artikel relevan, serta observasi daring terhadap aktivitas dan konten kampanye *Warga Jaga Warga* di berbagai *platform* digital. Analisis data dilakukan dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan dan konsistensi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warga Jaga Warga dalam Perspektif *Digital Peacebuilding*

Kampanye digital *Warga Jaga Warga* merupakan wujud nyata implementasi *digital peacebuilding* di Indonesia yang muncul sebagai reaksi terhadap krisis sosial-politik serta eskalasi kerusuhan pada Agustus hingga September 2025. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital, kampanye digital ini berhasil menciptakan ruang aman, membangun narasi damai, serta menguatkan solidaritas sosial di tengah ketegangan yang melanda masyarakat. Tujuan utama kampanye ini adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar dapat mencegah provokasi serta melindungi fasilitas umum yang terdampak kerusuhan. Kerusakan fasilitas publik terutama di Jakarta juga dirasakan masyarakat luas, sehingga pemerintah kota memberikan himbauan agar masyarakat tidak merusak fasilitas umum, sambil mendukung seruan meredam meluasnya kekerasan selama beberapa hari terakhir. Pesan ini disampaikan agar warga saling menjaga dan tidak menjadi sasaran pemanfaatan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Tagar #WargaJagaWarga mulai ramai di media sosial sebagai simbol kampanye digital yang bertujuan mencegah meluasnya tindakan anarkis (Irawati, 2025). Berdasarkan sejumlah unggahan di *platform* digital, poster dan konten yang beredar mengajak warga melindungi sesama, termasuk kelompok minoritas berbasis agama dan etnis. Unggahan-unggahan ini juga mendorong warga untuk saling menjaga dari pihak-pihak yang berupaya memprovokasi dengan narasi negatif, dan mendukung aspirasi masyarakat disampaikan secara damai tanpa anarkisme.

1. Menciptakan Ruang Aman

Tagar "Warga Jaga Warga" menggema di seluruh lini komunikasi, dari media sosial hingga bentuk ekspresi visual di ruang publik. Kampanye digital ini lahir untuk mengakomodasi semangat warga yang membutuhkan rasa aman dan perlindungan saat menyampaikan aspirasi, termasuk dalam mendukung "17+8 Tuntutan Rakyat" secara damai (Fachrezi, 2025). Warga

Jaga Warga mengoptimalkan *platform* digital sebagai alat koordinasi cepat dalam memantau dan menjaga keamanan lingkungan secara bersama. Sejumlah pemerintah daerah, LSM, media independen, *influencer*, dan individu aktif menggunakan tagar ini, contohnya:

- a. Pemerintah Kabupaten Gresik mengimbau masyarakat untuk tetap aman selama aksi massa berlangsung serta waspada terhadap provokator; beliau mengajak warga memanfaatkan fitur pelaporan di media sosial untuk meminimalisir penyebaran provokasi.
- b. KontraS membuka posko pengaduan digital untuk melacak dan membantu orang hilang selama aksi protes antara 25-31 Agustus 2025.
- c. Postingan di akun "Menjadi Manusia" menginformasikan dukungan psikologis daring dari Santosha sebagai ruang aman agar masyarakat dapat pulih dari tekanan.

Melalui media sosial, warga dapat melaporkan kejadian mencurigakan dan saling mengingatkan, memperkuat ikatan sosial yang merupakan modal sosial kuat dalam situasi krisis pertemanan dan kedekatan emosional yang secara alamiah membentuk solidaritas dan keamanan bersama (Andriyani, 2025).

2. Membangun Narasi Damai

Kampanye digital *Warga Jaga Warga* secara aktif mengedarkan narasi positif dan ajakan persatuan melalui tagar #WargaJagaWarga yang viral di media sosial. Narasi ini berperan sebagai benteng moral dalam melawan ujaran kebencian dan polarisasi yang meluas selama masa demonstrasi. Pesan kampanye menekankan pentingnya sikap saling menghormati, menjaga ketenangan, serta memverifikasi informasi sebelum dibagikan. Pendekatan yang dialogis dan inklusif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran etis untuk meredam potensi konflik serta memperkuat hubungan antarwarga, meskipun terdapat perbedaan pandangan. Konsistensi narasi damai ini membantu mencegah gesekan sosial dan menghindari tindakan anarkis.

Warga bergerak sebagai manifestasi mimpi besar bagi masa depan bangsa. Mereka ingin didengar, diayomi, dan dijamin keberlangsungan hidupnya dengan adil dan beradab, sesuai prinsip sila kedua Pancasila. Narasi ini fokus pada kepedulian menjaga konstitusi, memperbaiki kinerja pemerintah, dan menuntut transparansi, serta membangun keamanan demi kelancaran demonstrasi yang sesuai aspirasi masyarakat. Harapan besar digantungkan pada jargon *Warga Jaga Warga* sebagai simbol sinergi dan solidaritas antarwarga.

3. Memperkuat Solidaritas Sosial

Partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat dalam kampanye digital *Warga Jaga Warga* menunjukkan kekuatan solidaritas sosial yang sangat kuat, terutama di tengah kondisi penuh ketidakpastian. Era digital mempermudah komunikasi instan sekaligus koordinasi yang efektif, sehingga solidaritas ini dapat menyebar luas dan diikuti oleh komunitas dari berbagai wilayah. Solidaritas tersebut bukan hanya mendukung aspek keamanan, tetapi juga mempererat ikatan sosial yang esensial untuk membangun ketahanan masyarakat selama masa krisis.

Contoh konkret solidaritas ini terlihat dalam dukungan yang mengalir bagi para pengemudi ojek online (ojol) yang terdampak demonstrasi di Jakarta sejak 25 Agustus 2025. Bantuan berupa pesanan makanan dan minuman bahkan mengalir dari luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura, yang kemudian dibagikan secara cuma-cuma di beberapa titik pusat ibu kota. Para pengemudi ojol mengakui bahwa pendapatan mereka turun drastis akibat akses jalan yang tertutup dan kemacetan lalu lintas selama aksi demo (Febrian & Huda, 2025).

Selain itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pergantian nama Halte Transjakarta Senen Sentral menjadi Halte Jaga Jakarta, bersamaan dengan peluncuran armada bus listrik. Langkah ini sebagai pengingat dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga Jakarta agar kejadian kerusuhan tak terulang. Pramono Anung menegaskan bahwa menjaga Jakarta bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kewajiban seluruh lapisan masyarakat (Darmawan, 2025).

Platform "Menjadi Manusia" juga turut aktif mengkampanyekan solidaritas, mengajak masyarakat untuk saling menjaga dan membantu korban terdampak aksi massa, termasuk para pengemudi ojol, pelaku UMKM, dan petugas kebersihan. Platform ini bekerja sama dengan Kitabisa membuka peluang donasi agar mereka dapat bertahan di tengah kondisi sulit tersebut.

Kampanye digital *Warga Jaga Warga* berhasil memanfaatkan teknologi digital secara efektif untuk membangun ruang aman, menyebarkan narasi damai yang menekan ujaran kebencian serta polarisasi, sekaligus menguatkan solidaritas sosial sebagai modal utama dalam memperkuat *peacebuilding* berbasis masyarakat. Dengan mengkombinasikan interaksi daring dan aksi nyata, kampanye digital ini membuktikan bahwa *digital peacebuilding* adalah metode yang efektif dalam menjaga ketertiban sosial-politik yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Partisipasi masyarakat melalui kampanye #WargaJagaWarga sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif akan nilai solidaritas sosial dan pengendalian diri dalam menghadapi konflik. Kampanye ini mengajak warga agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menghindari ujaran kebencian yang bisa memecah belah masyarakat. Melalui jaringan komunikasi yang terorganisir dan solidaritas yang kuat, masyarakat mampu meredam gesekan sosial sekaligus mencegah eskalasi konflik menjadi kekerasan. Semangat gotong royong yang digagas oleh kampanye digital ini menjadi fondasi utama dalam membangun budaya damai yang menyeluruh dan berkelanjutan di tanah air.

Nilai-Nilai Non-Kekerasan Mahatma Gandhi dalam Kampanye Digital

Kampanye digital *Warga Jaga Warga* di Indonesia merupakan fenomena nyata *digital peacebuilding* yang mengadopsi prinsip-prinsip *Satyagraha* dari Mahatma Gandhi, yang terdiri dari tiga aspek utama: *Satya* (kebenaran), *Ahimsa* (non-kekerasan), dan *Tapasya* (pengorbanan diri). Berikut adalah uraian lengkap bagaimana ketiga prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik kampanye digital ini, yang didasarkan pada teori Gandhi dan pengalaman lapangan.

1. Satya (Kebenaran)

Prinsip *Satya* menegaskan komitmen terhadap kebenaran dan penyebaran informasi yang jujur serta akurat. Dalam konteks *Warga Jaga Warga*, warga secara aktif memerangi hoaks dan disinformasi yang beredar selama kerusuhan sosial pada Agustus hingga September 2025 dengan melakukan verifikasi fakta sebelum berbagi informasi. Contohnya adalah bantahan terhadap klaim palsu tentang kericuhan di Bandara Soekarno-Hatta dan Gedung DPR yang meluas di media sosial, sebagaimana dikonfirmasi oleh Tim Cek Fakta dan Mafindo. Selanjutnya, terdapat isu penetapan darurat militer yang banyak dibicarakan Masyarakat saat gelombang demonstrasi semakin meningkat disertai dengan banyaknya kerusakan fasilitas public. Akan tetapi, informasi ini tidak benar dan diklarifikasi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Akbarsyah, bahwa kondisi genting sudah mereda dan tidak ada darurat militer (Rahma, 2025). Pendekatan ini

menunjukkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar, selaras dengan ajaran Gandhi yang menyatakan kebenaran sebagai sumber kekuatan moral utama dalam membangun perdamaian.

Selain itu, untuk mengurangi adanya hoaks tersebar dan perluasan konflik, juga dihadirkan tuntutan bersama 17+8 untuk menyatukan suara dan aspirasi yang ingin diwujudkan Bersama. Tagar ini menjadi pengingat kepada warga untuk mewaspadai “aktor penyusup” yang kerap memicu kerusuhan di tengah massa dan kekerasan aparat yang tidak bisa dinormalisasi, meski atas nama pengamanan. Sinergi antara warga dan aparat harus terjalin nyata, bukan sekadar janji, khususnya mengingat data Tempo yang mencatat 1.042 orang luka-luka dan 10 orang meninggal selama kerusuhan tersebut. "17+8" merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang mendesak transformasi, reformasi, dan empati dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga terkait.

Respon tuntutan ini juga menghadirkan *platform* Bijak Memantau yang menghadirkan beberapa fitur untuk mengawasi dan mengawal perwujudan janji-janji yang telah disampaikan oleh Presiden dan pemerintah Indonesia, memantau kebijakan-kebijakan, serta memantau pejabat yang bertanggung jawab. Dengan ini, Bijak Menantau merupakan bentuk dari Ahimsa, mengawal kebijakan yang benar dan akurat untuk mencegah adanya asumsi negatif yang beredar yang berpotensi menghadirkan konflik kekerasan berkelanjutan.

2. Ahimsa (Non-Kekerasan)

Prinsip *Ahimsa* atau non-kekerasan diwujudkan lewat penolakan semua jenis kekerasan, fisik maupun verbal, termasuk ujaran kebencian dan provokasi melalui *platform* digital. Kampanye digital #WargaJagaWarga menjadi sarana warga menyebarkan pesan persatuan dan damai, meredam polarisasi, serta mengajak menjaga lingkungan tanpa kekerasan. Konsep ini bukan sekadar ungkapan empati antarwarga, tetapi juga kampanye solidaritas atas tindakan represif aparat keamanan pada massa aksi yang menimbulkan kematian. Simbol solidaritas tersebut diwujudkan melalui kampanye digital visual seperti pengubahan warna foto menjadi pink dan hijau atau disebut Gerakan *brave pink* dan *hero green*.

Salah satu prinsip penting adalah keyakinan bahwa kampanye digital yang dibangun atas dasar solidaritas dan empati kolektif akan melahirkan aksi massa murni yang tidak mudah disusupi pihak berkepentingan (Anwar, 2025). Dalam berbagai postingan kolaboratif antar komunitas dan media sosial seperti Infipop, Muslimvox, dan Pandemictalks, warga diajak untuk mundur sejenak dan tetap fokus pada substansi perjuangan, menghindari provokasi yang bisa memicu kekerasan. Mereka menyerukan mundur satu langkah, untuk ribuan langkah bersama nanti, tetap menyuarakan dengan kolektif dan fokus pada substansi.

Selain itu, juga terdapat postingan Instagram dari *social enterprise* PeaceGen Indonesia juga menyerukan agar aspirasi disampaikan secara logis tanpa kekerasan, menekankan 12 nilai dasar perdamaian yang menentang kekerasan karena hanya menghasilkan kekacauan, hilangnya peluang berdamai, dan ketidaknyamanan sosial. Dalam keterangannya, PeaceGen juga membagikan pengingat dari perwakilan PBB mengenai pentingnya dialog dan investigasi transparan terkait kekerasan yang terjadi selama demonstrasi di Indonesia.

Konkritnya, warga menjaga sikap bijak, saling menghormati perbedaan pendapat, dan tidak terjebak provokasi atau cuitan bernada anarkis. Di lapangan, warga bersama aparat melakukan ronda malam dan pengamanan lingkungan secara gotong royong tanpa kekerasan.

Pemerintah daerah mendorong budaya ini sebagai bentuk keamanan komunitas berbasis gotong royong, sesuai prinsip Gandhi bahwa *Ahimsa* adalah kekuatan aktif cinta kasih yang mendorong perubahan sosial tanpa melukai.

Sebagai contoh, sejumlah pengemudi ojek *online* (ojol) menggelar aksi damai dengan berjalan kaki dari Balai Kota Jakarta menuju Patung Kuda Arjuna di Monas sambil membagikan bunga mawar kepada aparat TNI dan Polri sebagai tanda perdamaian dan solidaritas, dalam peringatan terhadap Affan Kurniawan, pengemudi ojol yang meninggal dunia saat demonstrasi (Izan, 2025)

3. Tapasya (Pengorbanan Diri)

Tapasya berarti pengorbanan dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran dan perdamaian tanpa menggunakan kekerasan. Warga Jaga Warga mengekspresikan prinsip ini melalui komitmen sukarela menjaga keamanan lingkungan, baik secara fisik maupun digital, meskipun menghadapi risiko sosial dan tekanan disinformasi. Dukungan penuh masyarakat terhadap aparat keamanan dalam menjaga ketertiban, serta pengorganisasian mandiri aksi solidaritas memperlihatkan tingkat keteguhan moral yang tinggi.

Contohnya, sebanyak 215 orang dari berbagai kalangan berpartisipasi dalam aksi gotong royong #JagaJakartaBareng membersihkan dua halte Transjakarta di kawasan Simpang Lima Senen. Jumlah tersebut termasuk komunitas ojek online, pedagang pasar, pelajar, dan alumni sekolah kejuruan, yang bersama-sama menjaga keamanan dan kebersihan Jakarta Pusat (Sigit, 2025). Aksi kolaboratif ini mencerminkan semangat *Tapasya* melalui pengabdian dan kesetiaan menjaga lingkungan sebagai rumah Bersama.

Aksi sukarela ini dilakukan di beberapa titik, termasuk Halte Senen Sentral, Halte Senen Toyota Rangka, dan kaki Jembatan penyeberangan Orang (JPO). Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, menjelaskan bahwa kegiatan gotong royong ini merupakan wujud nyata kolaborasi masyarakat beragam kalangan untuk menjaga kota. "Mari bersama-sama kita jaga Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, karena kota ini adalah rumah kita bersama," ujarnya. Arifin mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga kota dengan rasa memiliki dan bertanggung jawab (Sigit, 2025).

Upaya gotong royong serupa juga didukung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang secara langsung terlibat dalam pembersihan dan perbaikan fasilitas umum, termasuk pengecatan dinding halte yang sebelumnya menjadi sasaran vandalisme massa aksi. Ia menegaskan pentingnya menjaga fasilitas umum agar tidak dirusak demi kepentingan bersama dan masyarakat luas. Kegiatan ini juga melibatkan pasukan kebersihan, komunitas ojek *online*, pelajar, serta petugas pasar yang bersatu padu membangun kembali kondisi Jakarta pasca kerusuhan.

Bukan hanya itu, Presiden Prabowo Subianto pun menggarisbawahi nilai penting tagar ini dalam menjaga lingkungan bersama dan mencegah provokasi dari oknum yang memperkeruh situasi. Dalam sebuah pertemuan dengan media di Hambalang, Jawa Barat, beliau menyatakan, "*Saya mengajak kita kembali ke budaya lama, seperti ronda dan siskamling, di mana warga secara aktif mengamankan lingkungan masing-masing*" (Fachrezi, 2025).

Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut mencerminkan bagaimana prinsip *Tapasya* yang diajarkan Gandhi dijalankan secara nyata oleh masyarakat Indonesia melalui kampanye digital Warga Jaga Warga. Semangat pengorbanan dan keteguhan hati berupa kolaborasi dalam

upaya menjaga keamanan lingkungan dan perdamaian sosial menjadi kekuatan moral utama yang menguatkan *digital peacebuilding* sekaligus membangun ketahanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Integrasi *Digital peacebuilding* dan Prinsip Non-Kekerasan dalam Kampanye Digital Warga Jaga Warga

Kampanye digital Warga Jaga Warga menjadi contoh nyata *digital peacebuilding* yang mengintegrasikan prinsip non-kekerasan Gandhi sebagai fondasi moralnya. *Digital peacebuilding* dalam kampanye digital ini berperan sebagai medium teknologi yang memperkuat partisipasi kolektif warga melalui media sosial dan komunikasi digital dalam menjaga ketertiban dan membangun perdamaian. Sementara prinsip non-kekerasan Gandhi yang meliputi Satya (kebenaran), Ahimsa (non-kekerasan), dan Tapasya (pengorbanan diri) memberi fondasi etis dan moral bagi perilaku dan strategi kampanye digital.

Kombinasi keduanya menciptakan model "perdamaian digital berbasis empati," di mana teknologi menjadi sarana untuk menyebarkan pesan damai, memverifikasi informasi, dan mengkoordinasi aksi kolektif yang berlandaskan solidaritas dan pengendalian diri. Narasi empati yang terbangun melalui tagar #WargaJagaWarga berhasil meredam ujaran kebencian, mengurangi polarisasi, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan baik antarwarga. Kampanye digital ini bukan hanya mengajak masyarakat berinteraksi secara aman di ruang digital, tetapi juga memupuk budaya perdamaian yang inklusif.

Dampak sosial dan kultural kampanye digital terlihat dari terbentuknya solidaritas lintas agama, kelas sosial, dan daerah yang kuat. Kampanye digital ini melibatkan beragam kelompok masyarakat, dari komunitas lokal hingga pengemudi ojek *online*, pelajar, pedagang, dan aparat keamanan, yang bersatu menjaga keamanan wilayahnya dan saling membantu dalam situasi krisis. Solidaritas ini melampaui batas identitas sektoral dan menjadi modal sosial penting dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat Indonesia yang beragam.

Secara regional, Warga Jaga Warga berpotensi menjadi model inovatif *digital peace initiative* di Asia Tenggara, mengingat relevansi dan formatnya yang inovatif dalam memadukan teknologi digital dengan nilai-nilai moral universal non-kekerasan. Model ini dapat menjadi rujukan bagi negara lain di kawasan dalam membangun perdamaian digital yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan solidaritas kolektif.

KESIMPULAN

Kampanye digital Warga Jaga Warga secara efektif mengintegrasikan prinsip *digital peacebuilding* dengan nilai-nilai non-kekerasan Gandhi, menciptakan model perdamaian digital berbasis empati yang kuat di masyarakat Indonesia. Teknologi digital menjadi medium utama yang memperkuat partisipasi kolektif warga dalam menjaga ketertiban dan membangun perdamaian, sementara prinsip non-kekerasan memberikan fondasi moral yang mengarahkan sikap dan tindakan tanpa kekerasan. Kombinasi ini menghasilkan sebuah platform yang tidak hanya menyebarkan pesan damai dan mengedukasi pentingnya verifikasi informasi, tetapi juga membangun solidaritas sosial yang inklusif lintas agama, kelas sosial, dan wilayah.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, D., Salman, R., & Kamal. (2025). *Sepuluh orang meninggal dalam gelombang demonstrasi – “Negara harus menjawab tuntutan masyarakat.”* BBC News Indonesia. [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o#:~:text=SEPTINUS SESA,Kamis \(28/08\).](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp949kn2d84o#:~:text=SEPTINUS%20SESA,Kamis%20(28/08).)
- Andriyani, T. (2025). *Warga Jaga Warga, Saat Pertemanan Tetangga Jadi Modal Sosial di Tengah Krisis.* UGM. <https://ugm.ac.id/id/berita/warga-jaga-warga-saat-pertemanan-tetangga-jadi-modal-sosial-di-tengah-krisis/>
- Anwar, S. (2025). *Social Policy: Kolektif Empati Warga Jaga Warga.* DistrikNews. <https://www.distriknews.com/kolom/38215863182/social-policy-kolektif-empati-warga-jaga-warga?page=2>
- Azahra, R. (2025). *Demo/ unjuk rasa kian menjadi penjarahan.* Kompas. <https://www.kompasiana.com/rosianaazahra0580/68dbcb4ced641545300492b2/demo-unjuk-rasa-kian-menjadi-penjarahan>
- Baytiyeh, H. (2019). Social Media’s Role in Peacebuilding and Post-Conflict Recovery. *Peace Review*, 31(1), 74–82. <https://doi.org/10.1080/10402659.2019.1613599>
- Darmawan, H. W. (2025). *Cerita di Balik Pergantian Nama Halte Senen Sentral Jadi Jaga Jakarta, Ada Pesan Khusus.* Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/09/05595241/cerita-di-balik-pergantian-nama-halte-senen-sentral-jadi-jaga-jakarta-ada>
- Fachrezi, R. (2025). *Esensi “Warga Jaga Warga” Lebih dari Sekadar Tagar.* CXO Media. <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20250913122737-55-181613/esensi-warga-jaga-warga-lebih-dari-sekadar-tagar>
- Febrian, L. P., & Huda, L. (2025). *Solidaritas Lintas Negara Mengalir untuk Ojol Jakarta, Pesanan Datang dari Negara Tetangga.* Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/04/06332701/solidaritas-lintas-negara-mengalir-untuk-ojol-jakarta-pesanan-datang-dari>
- Gandhi, M. (n.d.). *Gandhi’s Philosophy of Nonviolence.* GANDHI SEVAGRAM ASHRAM. https://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-articles/gandhi-philosophy-of-nonviolence.php?utm_source=chatgpt.com
- Gregorius, D., Kapele, Pineleng, S., & Barnabas Ohoiwutun. (2023). Seri Mitra Refleksi Ilmiah-Pastoral Konsep Ahimsa Menurut Mahatma Gandhi dan Relevansinya Dalam Komunikasi Manusia Masa Kini (Sebuah Kajian Filsafat). *Jurnal Seri Mitra*, 2(1), 33–46. <https://journal.stfsp.ac.id/index.php/jb/article/view/164>
- Hirblinger, A. T. (2023). Building a peace we don’t know? The power of subjunctive technologies in digital peacebuilding. *Peacebuilding*, 11(2), 113–135. <https://doi.org/10.1080/21647259.2022.2154957>
- Hirblinger, A. T. (2024a). Fighting Hate Speech on Social Media: The Challenge of “Deep Work” in Digital Peacebuilding. In S. Stetter & A. Reuss (Eds.), *Social Media and Peacebuilding How Digital Spaces Shape Conflict and Peace* (1st ed.). Palgrave Macmillan. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-73917-0_6
- Hirblinger, A. T. (2024b). When the digits don’t add up: Research strategies for post-digital peacebuilding. *Cooperation and Conflict*, 59(3), 425–446. <https://doi.org/10.1177/00108367231184727>
- Hirblinger, A. T., Hansen, J. M., Hoelscher, K., Kolås, Å., Liden, K., & Martins, B. O. (2023). Digital Peacebuilding: A Framework for Critical-Reflexive Engagement. *International*

- Studies Perspectives*, 24(3), 265–284. <https://doi.org/10.1093/isp/ekac015>
- Irawati, D. (2025). *Redam Dampak Kekerasan, Seruan Warga Jaga Warga Disuarakan*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/redam-dampak-kekerasan-seruan-warga-jaga-warga-disuarakan>
- Izan, K. (2025). *Driver Ojol Aksi Damai Bagikan Mawar ke Warga dan TNI-Polri di Monas*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-8092729/driver-ojol-aksi-damai-bagikan-mawar-ke-warga-dan-tni-polri-di-monas>
- Kahl, A., & Larrauri, H. P. (2013). Technology for peacebuilding. *Stability*, 2(3), 1–15. <https://doi.org/10.5334/sta.cv>
- King, A. S. (2022). Mahatma Gandhi, Satyagraha, and the politics of non-violence. *The Wiley Blackwell Companion to Religion and Peace*, 289–306. <https://doi.org/10.1002/9781119424420.ch24>
- KOMDIGI. (2025). *[HOAKS] Demonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta pada 31 Agustus 2025*. KOMDIGI.
- LeFebvre, R. K. (2016). Leveraging the Voices of Social Media for Peace and Security. *Sicherheit & Frieden*, 34(4), 231–235. <https://doi.org/10.5771/0175-274x-2016-4-231>
- Massey, G. (2017). Non-Violence & Social Change. In J. . Mathur (Ed.), *The Cambridge Handbook of Sociology*. Navajivan Mudranalaya. <https://doi.org/10.1017/9781316418376.048>
- Metro TV. (2025). *Fantastis! Ini Nilai Kerugian Pasca Demo 25-31 Agustus 2025 - [Zona Bisnis]*. <https://www.youtube.com/watch?v=vsZ5CCPezrM&t=12s>
- Purnomo, W. S. (2025). *Hoaks Seputar Demonstrasi Meningkatkan Pesat*. RRI. <https://rri.co.id/index.php/cek-fakta/1806835/hoaks-seputar-demonstrasi-meningkat-pesat?utm>
- Purwanto, A. (2025). *Bagaimana Gelombang Demonstrasi Bisa Berdampak pada Ekonomi Nasional?* Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-gelombang-demonstrasi-bisa-berdampak-pada-ekonomi-nasional>
- R.K.Prabhu, & U. R. R. (1966). The Mind of Mahatma Gandhi: Encyclopaedia of Gandhi's Thoughts. In *Gandhi's Thoughts*. Jitendra T desai.
- Rahma, D. (2025). *Komisi I DPR Tegaskan Tidak akan Ada Darurat Militer*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/komisi-i-dpr-tegaskan-tidak-akan-ada-darurat-militer-2066318>
- Sigit, B. (2025). *215 Pasukan Gabungan Bersihkan Dua Halte Transjakarta di Kawasan Simpang Lima Senen*. Pemkot Jakarta Pusat. <https://pusat.jakarta.go.id/v2/?/news/2025/215-pasukan-gabungan-bersihkan-dua-halte-transjakarta-di-kawasan-simpang-lima-senen>
- Tim Cek Fakta. (2025). *[HOAKS] Demonstrasi di Bandara Soekarno-Hatta pada 31 Agustus 2025*. Kompas. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/09/03/082400182/-hoaks-demonstrasi-di-bandara-soekarno-hatta-pada-31-agustus-2025>
- We Are Social. (2025). *Special Report: Digital 2025*. We Are Social. <https://wearesocial.com/id/blog/2025/02/digital-2025/>
- Young, O., & Young, E. (2016). Technology for Peacebuilding in Divided Societies: ICTs and Peacebuilding in Northern Ireland. *Transformative Connections*. https://media.nesta.org.uk/documents/tranconn_bright_ideas.pdf